

BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB


KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

12 Juni 2023

NTB

BPK Temukan Perdin Fiktif di Bappeda NTB, Ini Penjelasan Inspektorat

Editor: Rury Anjas Andita  12 Juni 2023



Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim (Dikit/Lombok Post)

MATARAM-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB menemukan Rp 388.100.000 yang merupakan belanja perjalanan dinas (perdin), tidak sesuai ketentuan. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 116.740.000 di antaranya diduga fiktif.

Dugaan fiktif tersebut ditemukan BPK dalam realisasi belanja perdin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB. Yang kemudian ditindaklanjuti mengkonfirmasi manajemen hotel serta pegawai bappeda yang seharusnya melaksanakan perdin.

Dalam laporannya, BPK menyebut ada 50 kegiatan perdin fiktif, namun tetap dibayarkan dengan nilai seluruhnya mencapai Rp 116 juta. Ke-50 kegiatan tersebut berada di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya (PSDA); Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (P2M); serta Sekretariat di Bappeda.

Untuk bidang PSDA, berdasarkan kesepakatan dengan kepala bidang, nilai perdin yang dibayarkan kepada pelaku perjalanan sebesar 40 persen. Adapun sisanya, diberikan kepada pelaksana perjalanan yang benar-benar pergi. Kesepakatan ini untuk menanggulangi biaya operasional tim selama perdin.

Adapun di bidang P2M, perdin hanya dibayarkan sebesar uang hariannya saja. Sedangkan sisanya diserahkan kepala bidang kepada bendahara pengeluaran pembantu. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kantor, seperti snack tamu dan tunjangan BBM mobil dinas kepala bidang.

Kemudian di sekretariat bappeda, perdin yang tidak dilaksanakan dibayarkan 50 persen dari total pertanggungjawaban. Sisa 50 persen, digunakan untuk biaya operasional tim selama perdin, seperti tambahan biaya makan hingga BBM.

Temuan lainnya terkait dengan kelebihan pembayaran, kepada pelaksana perjalanan dinas yang tidak menginap di hotel. Kelebihan bayar ini terungkap dari bukti kuitansi hotel dengan nilai palsu, yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Selain di bappeda, BPK menemukan pembayaran uang harian dalam perdin tidak sesuai ketentuan. Nilainya Rp 235.750.000 untuk tujuh OPD. Antara lain Sekretariat DPRD NTB, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, BRIDA, RS Manambai, dan RS Mandalika.

Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim mengatakan, timbulnya perdin tidak sesuai ketentuan, termasuk ada yang fiktif, imbas dari kurangnya pengendalian di internal. "Akibatnya itu, ada perdin yang tidak dilaksanakan, tapi tetap dibayarkan," kata Ibnu

Dari hasil laporan BPK, inspektorat akan mengambil sejumlah langkah. Salah satunya meminta pimpinan untuk memberikan teguran kepada pihak-pihak terkait. Adapun untuk pengembaliannya, Ibnu menyebut telah dilakukan ketika proses pemeriksaan dari BPK. "Sudah lunas kalau yang Rp 116 juta itu," ungkap Ibnu.

Meski telah mengembalikan, para pihak yang merancang perdin fiktif berpotensi disanksi. Sebab, temuan Rp 116 juta tersebut merupakan fraud. Ibnu mengatakan, sanksi di birokrasi bervariasi. Bisa berupa penundaan kenaikan pangkat maupun gaji hingga penurunan jabatan.

"LHP itu jadi dasar untuk langkah selanjutnya. Rekomendasinya itu kan berupa pengembalian, lebih dari itu jadi kewenangan pimpinan," tandasnya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, apa-apa saja yang menjadi temuan dalam LHP BPK, akan dituntaskan Pemprov sesuai dengan rekomendasi dari BPK. "Kami maksimalkan penyelesaian. Kan sudah ada rekom-rekom yang diberikan," kata Zul.

Sementara itu, dalam laporannya BPK menyebut telah dilakukan pengembalian atas temuan perdin. Yakni Rp 215.720.000 untuk uang harian yang melebihi standar satuan harga (SSH); kelebihan bayar penginapan Rp 35.610.000; dan perdin yang tidak dilaksanakan Rp 116.740.000. **(dit/r5)**